

## **BAB I**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rezim Orde Baru telah tumbang sepuluh tahun ke belakang, kini rakyat Indonesia berada dalam masa pemerintahan yang dikenal dengan masa reformasi. Tetapi, setelah reformasi berjalan kurang lebih selama sepuluh tahun, sebagian besar masyarakat Indonesia belum begitu merasakan dampak yang berarti selain *euforia* masyarakat menghirup udara kebebasan dalam berpolitik dan berpendapat yang sebelumnya mendapat pengekanan dan pengkerangkerangan. Kini kebebasan tersebut telah menemukan ruang yang terbuka. Akan tetapi tidak semua masyarakat –masyarakat awam- menyambut kejatuhan rezim Soeharto dengan suka cita, sebagian masyarakat Indonesia bahkan “merindukan kehadiran kembali” rezim ini. Apa pasalnya?

Sebagian rakyat Indonesia menyambut dengan suka cita hancurnya rezim tersebut setelah berkuasa selama 32 tahun. Mereka penuh dengan perasaan optimis bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia akan lebih baik jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat ketika rezim Orde Baru berkuasa. Golongan ini termasuk dalam golongan “elit” dalam masyarakat yang secara nalar-intelektual mereka memahami betul karakter pemerintahan yang dibangun oleh Soeharto dengan politik pencitraannya yang sempurna. Kalaupun disana-sini terdapat banyak kemajuan –terutama dalam bidang pembangunan-itu semua tidak lebih dari sekedar pembodohan terhadap Rakyat. Keberhasilan lain dari pemerintahan Soeharto adalah keberhasilannya dalam mengecoh rakyat Indonesia

dengan politik pencitraan yang sangat berhasil mengambil simpati hati rakyat. Sehingga kejahatan dan kebokbrokan yang selama ini menyelimutinya tidak pernah terendus oleh rakyat banyak. Oleh karenanya para cerdik pandai Negeri ini yang secara politis dan ideologis berseberangan dengan Soeharto menilai bahwa kejahatan Soeharto bukan hanya kejahatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) saja, tetapi mereka telah berhasil menciptakan sebuah generasi yang *Hipocrit* dan “Asal Bapak Senang”.

Sementara Sebagian masyarakat lagi menganggap bahwa reformasi yang menggantikan rezim Orde Baru tidak akan membawa banyak perubahan yang cukup berarti bagi masyarakat banyak. Sehingga mereka menganggap bahwa rezim sekarang tidak lebih baik dari rezim sebelumnya. Golongan ini termasuk kedalam golongan yang apatis-oportunis yang secara langsung tidak terlalu peduli dengan sistem pemerintahan yang korup ataupun berbudaya. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya mereka bisa hidup enak dan nyaman tanpa harus pusing-pusing memikirkan tentang masalah pemerintahan dinegerinya.

Banyak alasan-alasan yang menjadi pertimbangan, mengapa masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang berbeda tentang pemerintah mana yang dianggap ideal. Karena bisa dimaklumi, walaupun sejak Orde Baru sampai sekarang sistem pemerintahan kita masih tetap sistem pemerintahan presidensial, dengan Presiden sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tetapi corak dan arah kebijaksanaan yang dijalankan tiap-tiap penguasa berbeda-beda. Jika ada masyarakat sekarang yang merindukan sistem pemerintahan pada zaman Orde Baru wajar saja, karena memang pada saat itu banyak hal yang dirasakan

masyarakat “awam” lebih baik dan lebih “nyaman “ ketika Soeharto berkuasa. Salah satunya seperti yang di survei oleh Metro TV mengenai alasan apa yang menyebabkan masyarakat merindukan kehidupan pada saat pemerintahan Soeharto, salah satunya yaitu stabilitas keamanan yang terjaga, serta terjangkaunya berbagai kebutuhan masyarakat.

Beberapa kalangan menyebutkan bahwa lengsernya pemerintahan Soeharto adalah bentuk kemenangan masyarakat sipil (*Civil Society*), karena, kini semua masyarakat Indonesia menemukan sebuah celah, dimana mereka bisa bebas mengekspresikan eksistensinya tanpa harus takut terhadap perintah yang sedang berkuasa. Tetapi disisi lain, kran kebebasan yang telah di putarkan oleh para mahasiswa melalui gerakan reformasi ini membawa masyarakat dan bangsa Indonesia pada satu titik dimana bangsa ini seperti kehilangan kendali.

Kini masyarakat Indonesia menaruh harapan adanya perubahan yang signifikan dan bisa dirasakan oleh masyarakat pada semua lapisan (khususnya lapisan bawah), harapan tersebut kini bertumpu pada pemilu 2009 yang akan berlangsung pada April untuk pileg dan Juli untuk Pilpres. Akankah pemilu yang akan berlangsung tersebut menjadi ajang penentuan masa depan rakyat dan bangsa Indonesia ataupun pemilu tersebut hanya sebagai sebuah syarat bagi keberlangsungan sebuah pemerintahan yang demokratis? Dan pemilu yang dilaksanakan tidak mengahsilkan perubahan yang berarti bagi Rakyat Indonesia.

Isu masyarakat Madani (*Civil Society*) semakin menguat dan santer dibicarakan orang (setidaknya bagi sebagian cendekiawan Indonesia) sejak Tumbangnya Orde Baru, walaupun dalam tataran wacana konsep ini bukan

barang baru bagi sebagian cendekiawan Indonesia. Tetapi karena alasan-alasan tertentu, wacana ini baru mengemuka secara luas setelah lengser ke prabon. Pemikiran-pemikiran seputar konsep masyarakat Madani (*Civil Society*) terakumulasi pada seminar Nasional yang diselenggarakan oleh program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, pada tanggal 25-26 September 2008 dengan mengangkat tema “*Membangun masyarakat Madani Menuju Indonesia Baru Dalam Milenium Ketiga*”. Dalam seminar tersebut, berbagai sudut pandang dan pendekatan disampaikan berkaitan dengan masyarakat madani.

Banyak Tokoh-tokoh dan para Cendekiawan Indonesia yang menyuarakan wacana ini pada tataran diskursus seperti dalam bentuk seminar, diskusi dan penulisan buku-buku. Diantara sekian banyak Tokoh yang banyak menulis tentang tema Masyarakat Madani adalah M. Dawam Raharjo, Nurckholish Madjid, Azyumardi Azra dan beberapa cendekiawan lainnya baik secara khusus menulis dalam satu buku ataupun hanya menulis artikel untuk media dan acara-acara seminar lainnya.

Mengenai masa depan masyarakat Madani, menurut Antonio Gramsci yang dikutip oleh Yasraf Amir Piliang menyebutkan bahwa untuk membentuk masyarakat Madani sangat bergantung pada tersedia atau tidaknya sebuah “ruang” bagi pertarungan berbagai ide gagasan atau ideologi, oleh karenanya kehadiran ruang publik (*Public Sphere*) menjadi sangat niscaya untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang Madani. Sarat yang kedua yaitu, bagi hidupnya sebuah masyarakat Madani adalah lenyapnya feodalisme sebagai ideologi tunggal.

Sebaliknya, feodalisme akan terkikis dengan sendirinya bila daya kritis dan daya kreatif masyarakat dibuka. Untuk membuka semuanya ini perlu diciptakan satu medan komunikasi terbuka, termasuk komunikasi politik<sup>1</sup>.

Indonesia sekarang ini berada dalam proses transisi menuju pematangan dan pendewasaan dalam berbagai aspek. Serelah cukup lama masyarakatnya berada dalam sistem yang represif yang mengekang dan membungkam ide-ide dan pemikiran yang bertentangan dengan ideologi utama yang menjadi haluan “pemerintah”. Dan dalam proses transisi tersebut menuju perubahan sosial menurut Yasraf setidaknya ada tiga tahapan perkembangan yang bersifat gradual. *Pertama* adalah tahapan dekonstruksi. Dalam tahap ini segala bentuk oposisi binner harus dibongkar (pancasilais/ anti pancasilais, warga asli atau keturunan dll), dengan demikian tidak ada klaim bahwa sekelompok masyarakat merasa bahwa diri mereka lebih pancasilais dibandingkan dengan masyarakat lain. Yang *kedua* adalah tahap transisi. Dalam tahap ini masyarakat banyak belajar dari kesalahan menuju perbaikan dan pembenahan dalam berbagai bidang pada tahap ini bisa berlangsung dengan cepat ataupun lambat. Dan *ketiga* adalah tahap terobosan. Pada tahap ini dapat dihasilkan terobosan dan inovasi, visi dan misi dalam berbangsa dan bernegara<sup>2</sup>.

Sebagai dampak dari era keterbukaan yang sekian lama disumbat, kini berbagai pemikiran mengenai berbagai isu telah menemukan tempatnya, tidak terkecuali isu-isu yang dilontarkan oleh beberapa cendekiawan muslim diantaranya tentang konsep-konsep masyarakat madani.

---

<sup>1</sup> Yasraf Amir Piliang, dalam pengantar Buku *Jika Rakyat Berkuasa; Upaya membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999, hlm.28.

<sup>2</sup> Yasraf, *Ibid*, hlm.29.

Secara historis bangunan masyarakat madani dikalangan umat Islam Indonesia telah terbentuk dalam wujudnya yang paling primer, yaitu dalam bentuk pengelompokan sosial yang kuat yang dilandasi saling memiliki yang kokoh sehingga mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Lahirnya organisasi-organisasi sosial keagamaan di awal abad 20 seperti Muhammadiyah, NU Sarekat Islam merupakan sebuah representasi dari masyarakat Madani<sup>3</sup>.

Menurut Dawam Rahardjo, Masyarakat Madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum yang disebutnya *al-Khair*. Masyarakat seperti itu menurutnya perlu dipertahankan dengan membentuk persekutuan-persekutuan, perkumpulan-perkumpulan, perhimpunan atau asosiasi dan memiliki visi dan pedoman perilaku. Dasar utama masyarakat Madani adalah persatuan atau integritas sosial yang didasarkan pada satu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan<sup>4</sup>.

Hal senada dikemukakan oleh Muhammad As Hikam yang menyebutkan bahwa pemberdayaan *Civil Society* adalah sebuah keniscayaan apabila tujuan jangka panjangnya adalah sistem politik demokratis yang benar-benar partisipatoris. Menurut strategi pemberdayaan yang memiliki jangkauan jangka pendek, menengah dan panjang perlu dipikirkan kembali<sup>5</sup>.

Namun sekarang ini isu atau wacana tentang masyarakat madani kembali meredup, setidaknya wacana ini kurang nampak ke permukaan dan di dalam

---

<sup>3</sup> Ahmad Gaus AF, *Masyarakat Madani Warisan Nabi Muhammad SAW*, Dalam buku Kehampaan spiritual Masyarakat Modern, Media Cita, Jakarta, hlm 320.

<sup>4</sup> Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, kelas Menengah dan Perubahan Sosial*, Jakarta, LP3ES, 1999, hlm. 152.

<sup>5</sup> Muhammad As Hikam dalam kumpulan tulisan *Jika Rakyat berkuasa, Upaya membangun masyarakat madani dalam Kultur feodal*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1999, hlm. 292.

forum-forum ilmiah lainpun rupanya wacana ini sudah kehilangan “pamornya”, sehingga orang enggan untuk membicarakannya. Gejala seperti ini entah merupakan preseden buruk bagi para penggiat wacana ini atautkah karena wacana ini terlalu ideal untuk dipraktekan dalam konteks negara Indonesia? yang jelas wacana ini sekarang semakin tersingkirkan pamornya , kalah dibandingkan dengan suasana hangat menjelang pilpres 8 Juni 2009. tetapi seperti yang dikemukakan oleh Muhammad As Hikam, dalam pengantar buku untuk Ahmad Baso, dia menyebutkan bahwa:

“Buku apapun yang ditulis tentang Civil Society merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dan dihargai, karena wacana itu dan pengembangannya untuk konteks Indonesia memang masih dalam taraf awal. Harus diakui ini memerlukan upaya-upaya rekonstruksi, penambahan dan bahkan dekonstruksi atas pikiran-pikiran yang sudah ada, baik dari barat itu sendiri atau yang kini dicoba dikembangkan di indonesia. Jadi usaha-usaha untuk mengembangkan wacana ini adalah suatu hal yang perlu dihargai dan dipuji<sup>6</sup>”.

Pamor masyarakat madani yang kian hilang digantikan dengan wacana-wacana yang muncul seperti Liberalisme, Pluralisme, sekulerisme dll yang gaungnya menimbulkan perdebatan yang antara yang pro dan yang kontra, mudah-mudahan sebagai pertanda berakhirnya dan buntu-nya macana ini dalam konteks keindonesiaan. Masyarakat madani dalam konteks Historis Islam, akan

---

<sup>6</sup> Muhammad As Hikam dalam pengantar buku *Civil society Versus Masyarakat Madani, Arkeologi pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia*, Pustaka hidayah, Bandung. hlm. 9.



merujuk kepada masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang sebelumnya kota ini dikenal dengan nama Yatsrib.

Jaminan kebebasan beragama antara penganut agama Yahaudi, serta agama Islam dan juga persaudaraan dan kerja sama antara kaum pendatang (Muhajirin) dan kaum Pribumi (Ansor) merupakan hal-hal yang patut dicontoh dalam konteks keindonesiasian sekarang.

Wacana tentang Masyarakat Madani menarik untuk ditelaah kembali, terlebih sekarang dimana bangsa Indonesia masih mencari dan mengembangkan sistem pemerintahan yang dianggap ideal. Diantara sekian banyak tokoh seperti Almarhum Nurcholish Madjid, Muhammad AS Hikam, Ahmad Baso, Azyumardi Azra dll, barangkali M. Dawam raharjo adalah termasuk orang yang banyak menyumbangkan pemikirannya tentang wacana Masyarakat Madani. Oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mengangkat tema tentang Masyarakat Madani dengan judul Penelitian “KONSEP MASYARAKAT MADANI MENURUT M. DAWAM RAHARDJO”

## **B. Perumusan Masalah**

Berangkat dari deskripsi masalah diatas, permasalahan yang akan diangkat dan diteliti yaitu adanya konsep masyarakat Madani yang dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo dan bagaimana peluang terwujudnya masyarakat “ideal” tersebut dalam kontek Negara Indonesia. Oleh karenanya untuk lebih memperjelas mengenai masalah-masalah tersebut dibawah ini diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:



1. Bagaimana Konsep Masyarakat Madani menurut Dawam Rahardjo?
2. Elemen-elemen apa saja yang menjadi faktor pendukung terbentuknya Masyarakat madani Menurut Dawam Rahardjo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melihat dan mengetahui konsep Masyarakat Madani Menurut Dawam Rahardjo.
2. Untuk mengetahui elemen-elemen apa saja yang menjadi faktor pendukung terbentuknya masyarakat madani menurut Dawam Rahardjo.

### **D. Kegunaan Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan juga praksis.

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan landasan teoritis dan kerangka bagi pengembangan wacana sosiologi, khususnya dalam kajian tentang masyarakat madani di Indonesia.
2. Secara Praksis penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat ataupun lembaga Swadaya masyarakat yang mempunyai cita-cita mewujudkan masyarakat yang ideal yaitu terwujudnya rakyat Indonesia yang adil makmur dan tentram lahir batin seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan ataupun landasan berpijak ataupun juga perbandingan dasar bagi para mahasiswa yang berminat terhadap kajian yang sama.

## E. Kerangka Pemikiran

Masyarakat sebagai sebuah objek Kajian sosiologi memiliki beragam pengertian sesuai dengan sudut pandang para ilmuwan dengan masing-masing bidang spesialisasi keilmuannya. Banyak sekali tokoh ilmuwan yang memberikan definisi terhadap masyarakat. Diantara para tokoh yang memberikan definisi tentang masyarakat tersebut adalah Koentjaraningrat yang mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama<sup>7</sup>.

Sementara Maciver dan Page menyatakan bahwa Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Sedangkan Raph Linton mendefinisikan masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Dan menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan<sup>8</sup>.

Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat adanya unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah masyarakat anatara lain: bahwa dapat dikatakan masyarakat jika didalamnya terdapat manusia yang hidup bersama, bercampur

---

<sup>7</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar ilmu Antropologi*, Jakarta, Rienka Cipta, 1990, hlm. 146.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 24.

untuk waktu yang begitu lama, mereka menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama<sup>9</sup>.

Istilah Masyarakat Madani yang disepadankan dengan istilah *Civil Society* sebenarnya telah beredar dalam pembicaraan tentang filsafat sosial pada abad ke-18 sampai akhir abad ke-19, kemudian menghilang dan muncul lagi di Eropa Barat sekitar tahun 1990. secara harfiah, istilah ini berasal dari istilah Latin, *Civilis Societas*, yang mula-mula dipakai oleh Cicero (106-43 SM), dia adalah seorang orator dan seorang Pujangga Roma yang hidup pada abad pertama Sebelum Kristus. *Civil Society* disebutnya sebagai sebuah masyarakat politik (*political Society*) yang memiliki kode Hukum sebagai dasar pengaturan Hidup<sup>10</sup>.

Kemudian Istilah itu dihidupkan kembali oleh oleh para Filusuf Sosial seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan J.J. Rousseau (1712-1778). Hobbes berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau Negara. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (*Political Society*). Sedangkan Rosseau mengemukakan bahwa masyarakat politkn adalah merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*Social Contract*) dimana anggota anggota masyarakat telah menerima suatu pola hubungan dan pergaulan bersama<sup>11</sup>

Kemudian pada Abad ke -18 istilah *Civil Society* mengalami pergeseran terminologi. Negara dan *Civil Society* kemudian difahami sebagai dua buah entitas yang berbeda sejalan dengan proses pembentukan sosial dan perubahan struktur

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 24-25.

<sup>10</sup> Rahardjo, *Op Cit.*, hlm.137.

<sup>11</sup> Rahardjo, *Ibid*, hlm.138.

politik di Eropa sebagai akibat dari pencerahan dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang kemudian keduanya turut mendorong tergerusnya rezim-rezim otoriter.

Sedangkan dalam konteks ke Indonesiaan, gagasan *Civil Society* berawal dari kedatangan Dato Anwar Ibrahim yang saat itu sedang menjabat sebagai Menteri keuangan dan asisten Perdana menteri Malaysia pada acara simposium Nasional Festival Istiqlal, yang diadakan pada tanggal 26 September 1995.

Sebenarnya, jika kita merunut sejarah, istilah masyarakat Madani yang dalam bahasa Inggris disepadankan dengan Istilah *Civil Society* diawali ketika Rasulullah hijrah dari Kota Mekkah ke Madinah (yang kala itu dikenal dengan Nama Yatsrib). Kemudian Nabi melakukan perjanjian dengan berbagai golongan di kota itu yang dikenal dengan istilah kontrak sosial yang dinamakan Piagam Madinah. Didalam piagam tersebut berisi pasal-pasal yang menjadi keputusan dasar yang telah disepakati bersama.

Dalam piagam madinah ini bisa dilihat dalam konteks pembinaan masyarakat yang pluralistik dimana didalamnya terdapat kesepakatan bahwa mereka hidup dalam wilayah tertentu yakni Madinah sebagai tempat hidup bersama; lalu mereka dipersatukan dalam kehidupan bersama dan bekerja sama dalam mencapai tujuan umum yaitu menciptakan kerukunan dan kemaslahatan bersama sama. Dan juga menerima Muhammad sebagai pemimpin tertinggi yang memegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka Dalam perspektif

ini masyarakat Madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum yang disebut *Al-khair*<sup>12</sup>.

Menurut Dawam Rahardjo dasar utama masyarakat Madani adalah persatuan atau integrasi sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan dan hidup dalam suatu persaudaraan. Atas dasar itulah manusia diperintahkan untuk membentuk perhimpunan-perhimpunan yang mempunyai cita-cita menciptakan kebajikan kebajikan umum sebagaimana dilukiskan dalam Al-qur'an.

*Dan hendaklah ada diantara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menegakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mencapai kebahagiaan.*

Menurut Anas Urbaningrum, Al-qur'an dan Hadits sebagai sumber rujukan utama umat islam ternyata memiliki "petunjuk" dalam penyelenggaraan negara dan memiliki konsep-konsep yang sistematis dengan visi dan misi yang jelas.

*Pertama, pemimpin yang amanah dan prinsip pembagian kerja yang sesuai dengan keahliannya. Dalam surat Annisa ayat 58-59 ditegaskan bahwa "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya pada kamu.*

---

<sup>12</sup> Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2001. hlm. 98.

*Kedua*, prinsip keadilan. Bahwa negara harus dijalankan dengan prinsip keadilan. *Ketiga* musyawarah. Konsep musyawarah ini mencerminkan semangat yang mendalam untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Dan *keempat* penegakan hak-hak asasi manusia dan prinsip egalitarian<sup>13</sup>.

Perkembangan dan masa depan masyarakat Madani di Indonesia menurut Maswadi Rauf paling tidak ditentukan oleh dua hal. Pertama, kesiapan warga masyarakat sendiri untuk memainkan peran yang aktif sehingga dianggap cukup kuat oleh pihak negara. Kedua, sikap penguasa politik. –penguasa politik yang cenderung refresif secara berlebihan pasti akan menghambat perkembangan masyarakat madani<sup>14</sup>.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode *Content Analysis* untuk mendapatkan pemahaman secara konseptual terhadap pemikiran Dawam Rahardjo tentang Masyarakat Madani dan melakukan penelaahan terhadap pernyataan-pernyataan dan makna yang terkandung dalam pemikiran tersebut

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>13</sup> Anas Urbaningrum dalam Kumpulan tulisan *Kehampaan spiritual masyarakat modern ; respon dan transpormasi nilai-nilai islam menuju masyarakat Madani*, Mediacita, Jakarta, 2000, hal. 344-345.

<sup>14</sup> Maswadi Rauf dalam buku *Jika Rakyat Berkuasa* , Pustaka Hidayah, Bandung, hlm. 304.

1. Sumber data primer yaitu berupa tulisan-tulisan dari Dawam Rahardjo yang membicarakan secara langsung ataupun tidak langsung tentang masyarakat madani seperti: *Masyarakat Madani: agama, Kelas menengah dan Perubahan Sosial; Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa; Pembangunan Orde Baru dan Masyarakat Madani; Lembaga Swadaya Masyarakat: Menuju Masyarakat madani; Gerakan keagamaan dan Penguatan Civil Society*. dan untuk memperkuat data-data yang telah diperoleh dari sejumlah buku, majalah, koran, jurnal dll, jika memungkinkan, penulis akan melakukan wawancara dengan Dawam Rahardjo guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang aktual dan final.
2. Sumber data Sekunder yaitu data penunjang yang didapat dari beberapa sumber seperti dalam buku *Menuju Masyarakat Madani* dari Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A, *Membangun Masyarakat Madani menuju Indonesia Baru Milenium Ke-3* dari Taufik Abdullah Dkk, kumpulan tulisan dalam buku *Kehampaan Spiritual masyarakat modern*, DR. Nurcholish Madjid et.al; Kumpulan tulisan dalam Buku *Jika Rakyat berkuasa* (Editor: tim maula); Buku Ahmad Baso *Civil Society Versus Masyarakat Madani; Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* Karya Din Syamsuddin, juga buku *Masyarakat Tamaddun* dari Sufyanto, serta Koran, jurnal, internet, serta wawancara dengan para tokoh yang ahli dalam bidang yang sedang penulis teliti.



### 3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik berupa hasil wawancara, kumpulan tulisan dalam buku-buku, Koran, majalah ataupun jurnal, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut sesuai dengan tema dan perumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi untuk menelaah tema-tema yang telah dirumuskan kemudian menafsirkannya sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tema-tema yang akan di bahas, termasuk didalamnya mencari kata kunci (*Key word*) mengenai konsep masyarakat Madani.
2. Mengumpulkan sumber data, baik yang berupa data Primer maupun yang berupa data sekunder dan mengelompokannya berdasarkan tema-tema yang telah ditentukan
3. Melakukan analisis isi (*Content Analysis*) terhadap data-data yang terkumpul.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG